

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

Jalan Lintas Sumbawa Talabiu, Woha, Bima, Nusa Tenggara Barat



KATA PENGANTAR



Puji syukur, senantiasa kami haturkan kepada Allah SWT, tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan karunia-nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja (satker) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima pada tahun 2024 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor: 17/2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan nasional dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional yang memuat: 1) Prioritas pembangunan, 2) Rancangan kerangka ekonomi makro, 3) Program Kementerian/Lembaga (K/L), 4) Program lintas K/L dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima tahun 2020-2025 yang telah diselaraskan dengan Renstra BPPMHKP, KKP untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan setiap tahunnya. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima sebagai unit pelaksana teknis juga menyusun kegiatan dan anggaran selama setahun sesuai dengan besarnya pagu anggaran yang ditetapkan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu, Hasil Kelautan dan Perikanan. Sejalan dengan sistem penganggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penganggaran berbasis kinerja, maka semua kegiatan yang direncanakan didalam Rencana Kerja Tahunan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima harus dapat dipertanggung jawabkan secara tepat, jelas dan terukur dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target-targetnya. Selain itu, dalam mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab. Untuk itu pengelolaan keuangan negara harus menerapkan kaidah-kaidah yang baik yaitu, 1) Akuntabilitas berorientasi pada hasil, 2) Profesionalitas, 3) Proposionalitas, 4)

Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara dan 5) Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Namun demikian, Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan, untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sebagai bahan untuk penyempurnaan Rencana Kinerja Tahunan dimasa yang akan datang.

Bima, 31 Maret 2024

Kepala Stasiun KIPM Bima



Johnson Petrus

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas dan Peran Organisasi	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran.....	2
BAB 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024	3
2.1. Rencana Strategis	3
2.2. Arah Kebijakan	4
2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	5
2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Stasiun KIPM Bima	10
BAB 3. PENUTUP	11
LAMPIRAN	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (Rencana untuk 5 Tahun) yang di buat berdasarkan pada Rencana Aksi Program eselon 1 dan Renstra kementerian pada setiap satuan kerja. Untuk satuan kerja di tingkat eselon 2, Rencana Aksi Kegiatan (5 Tahun) akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kerja tahunan yang sistematis maka pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan 2020 - 2025 juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Kerja Tahunan merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan selama 5 tahun. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah target *setting* dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai penanggung jawab bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di pintu masuk negara maka Kantor Stasiun KIPM Bima perlu menyusun RKT Tahun 2024 dengan mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan Stasiun KIPM Bima tahun 2020 - 2025.

1.2. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara maka, pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peranan strategis Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan otoritas kompeten penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan dari hulu hingga hilir. Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata yaitu, melakukan sertifikasi terhadap hasil budidaya, penangkapan maupun penanganan dan pengolahan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan

perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Lembaga ini juga melaksanakan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan melalui proses inspeksi terhadap sistem yang diterapkan oleh unit produksi dan penanganan atau pengolahan. Pengawasan mutu yang dilakukan melalui proses surveilan (pengamatan) dan *monitoring* (pemantauan) dalam rangka melihat konsistensi penerapan sistem di unit tersebut. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dilakukan oleh inspektur mutu BPPMHKP yang tersebar di UPT (Unit Pelaksana Teknis) seluruh Indonesia sebanyak 404 orang.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat.

Untuk persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen pengendalian perdagangan.

Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) *Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*) hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Dengan demikian peran BPPMHKP sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

1.3. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Stasiun KIPM Bima Tahun 2024, sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan acuan Penetapan Kinerja Kantor Stasiun KIPM Bima;
- b. Sebagai bahan acuan Pelaksanaan Kegiatan Kantor Stasiun KIPM Bima;
- c. Meningkatkan Efisiensi, Efektifitas, Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja.

1.4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Kantor Stasiun KIPM Bima sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup BPPMHKP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti yang tercantum dalam Permen KP 205 Tahun 2023.

1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan Stasiun KIPM Bima adalah :

- 1) Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024;
- 5) Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2020-2024;
- 6) Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya Tahun 2020-2024

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional” serta menetapkan misi antara lain :

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kontribusi Pembangunan pengawasan dan pengendalian mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi. Sehubungan dengan itu, selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan maka visi pembangunan BPPMHKP adalah “**Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman dan Terpercaya**” serta menetapkan misi :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan
2. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

2.1.2. Tujuan Strategis

Tujuan pembangunan Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia dengan sasaran :

1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan (ekspor, impor, dan antar area).
2. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
3. Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta

2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program- program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BPPMHKP. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi

BPPMHKP dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2020-2024, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina karantina serta jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya melalui strategi:
 - a. Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah RI, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI
 - b. Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.
2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (*quality and safety*)

assurance) hasil perikanan melalui strategi:

- a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
 - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
 - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan
 - Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
 - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
 - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025)
 - b. Harmonisasi sistem penjaminan Mutu yang Implementatif
 - Harmonis sistem, perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
 - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :
- a. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
 - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

2.3.1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan BPPMHKP tersebut dibagi dalam empat perspektif antara lain :

- SS.1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
- SS.2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
- SS.3. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP

2.3.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2024. Indikator kinerja BPPMHKP seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bima (sertifikat)	5
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (UPI)	
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Produk)	1
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bima (UPI)	2
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima (nilai)	84
		6	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Parameter)	2
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP				
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Bima (indeks)	84
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	82
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	100
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80
		11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	93,76

		12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	82
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat, UPT dan Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPMHKP

Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan perkarantinaan ikan sesuai standard dan perkembangan IPTEK. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemanfaatan sumberdaya perikanan yang diikuti oleh meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestic. Jaminan kesehatan ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman penyebaran HPI/HPIK.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil. Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotic pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya *Malachite green* pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan

keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana

hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Stasiun KIPM Bima

Rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Bima Tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana kerja Stasiun KIPM Bima dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM Bima untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan rekofusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel.

Program : Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 2.998.580.000,-

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	84.900.000,-
	Pengendalian Mutu	84.900.000,-
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	491.500.000,-
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	491.500.000,-
3	Program Dukungan Manajemen	2.422.180.000,-
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2.422.180.000,-
Total Anggaran Stasiun KIPM Bima Tahun 2024		2.998.580.000,-

BAB III. PENUTUP

Program kerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu, Hasil Kelautan dan Perikanan pada TA 2024 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian kelautan dan perikanan. Pelaksanaan program PPMHKP ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
2. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan memerlukan adanya dukungan unit kerja terkait dan masyarakat luas. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Stasiun KIPM Bima, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan TA 2023 dalam mewujudkan “*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya*”. Di lingkup Stasiun KIPM Bima Tahun Anggaran 2024.

